

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PAKET PANGAN ISOLASI MANDIRI COVID19 MELALUI DINAS SOSIAL KABUPATEN PONOROGO

Ashfiya Ahsani Mufliha¹, Dian Tri Rahayu², Nurul Wahyu Ningtyas³
^{1,2,3}Prodi D III Akuntansi, POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
Email : ashfiyaam@gmail.com

Abstrak

Sebagai dinas yang berkedudukan dibidang sosial, Dinsos P3A juga menjalankan peran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melaksanakan program penyaluran bantuan paket pangan bagi warga di Kabupaten Ponorogo yang melakukan isolasi mandiri terkait Covid-19. Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjamin gizi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri terkait pandemi Covid-19 (Kominfo, 2020). Adapun tujuan penulisan laporan adalah 1) Mengetahui pelaksanaan praktik kerja lapangan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo; 2) Meninjau pelaksanaan jalannya kerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo; 3) Meninjau pelaksanaan Program Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri Covid-19 yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Hasil yang diperoleh yaitu : 1) Mekanisme Penyaluran Bantuan Kurang Efektif disebabkan penyaluran bantuan pangan isolasi mandiri Covid-19 harus melewati birokrasi yang panjang. Selama ini, Dinsos P3A Ponorogo harus memperoleh laporan pengajuan bantuan yang berasal dari masyarakat desa dimana penerima bantuan tersebut adalah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 maupun yang mengalami kontak erat dengan penderita Covid-19 serta lingkungan warga terinfeksi. 2) Sumberdaya manusia yang terbatas menyebabkan tidak semua bantuan dapat diserahkan secara langsung oleh Dinsos P3A kepada masyarakat. Disebabkan banyaknya pengajuan dari pemerintah desa mengenai bantuan pangan isolasi mandiri serta wilayah Kabupaten Ponorogo yang relatif luas, maka kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai penyalur bantuan pangan tersebut juga membutuhkan jumlah yang banyak. Namun, terbatasnya sumber daya manusia maupun alat pengangkut menyebabkan bantuan tidak dapat disalurkan secara serentak antar desa melainkan secara bergantian dari satu desa ke desa lainnya.

Kata kunci : Dinas Sosial P3A, Program Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri Covid-19

Abstract

As an agency domiciled in the social sector, Social Affairs Office P3A also plays a role in the prevention and control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) by implementing a program to distribute food package assistance for residents in Ponorogo Regency who are self-isolating related to Covid-19. This program is one of the efforts of the Ponorogo Regency Government in ensuring the nutrition of residents who are undergoing independent isolation related to the Covid-19 pandemic (Kominfo, 2020). The purposes of writing the report are 1) Knowing the implementation of field work practices at the Department of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection, Ponorogo Regency; 2) Reviewing the implementation of work in the Office of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection, Ponorogo Regency; 3) Reviewing the implementation of the Covid-19 Self-Isolation Food Package Assistance Program 19 carried out through the Office of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection, Ponorogo Regency. The results obtained are: 1) The Aid Distribution Mechanism is Less Effective because the distribution of food aid for Covid-19 self-isolation must go through a long bureaucracy. So far, the P3A Ponorogo Social Service Agency must obtain reports on requests for assistance from rural communities where the

recipients of the assistance are people infected with Covid-19 or those who have close contact with Covid-19 sufferers and infected residents. 2) Limited human resources mean that not all assistance can be handed over directly by the P3A Social Service to the community. Due to the large number of submissions from the village government regarding self-isolation food assistance and the relatively large area of Ponorogo Regency, the need for human resources as distributors of food aid also requires large amounts. However, limited human resources and means of transport meant that aid could not be distributed simultaneously between villages but alternately from one village to another.

Keywords: P3A Social Service, Covid-19 Independent Food Isolation Package Assistance Program

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2015, PKN STAN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. PKN STAN mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Keuangan Negara. Lulusan PKN STAN dapat ditempatkan di berbagai instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Sehingga, diperlukan persiapan yang matang untuk mencetak lulusan yang memiliki sumber daya manusia terbaik dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Persiapan dilakukan melalui pemberian bekal berupa ilmu pengetahuan yang disalurkan melalui bangku perkuliahan.

Selain itu, PKN STAN juga mewajibkan kepada mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan calon punggawa keuangan yang berkompeten. Melalui PKL, mahasiswa mampu terjun langsung dalam dunia kerja, sehingga dapat merasakan budaya dan etos kerja dalam instansi di lingkup pemerintahan. Kegiatan PKL juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai relevansi antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama berkuliah dan implementasinya di lapangan. Sehingga, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui cara mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam bangku kuliah pada dunia kerja. PKL dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo (Dinsos, P3A). Laporan PKL ditulis untuk merangkum mengenai dua bulan kegiatan PKL yang telah dilaksanakan serta membahas isu terkini yang terdapat pada instansi tersebut. Tema yang diangkat dalam laporan ini ialah mengenai pelaksanaan bantuan paket pangan isolasi mandiri *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2016, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Ponorogo dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sebagai dinas yang berkedudukan dibidang sosial, Dinsos P3A juga menjalankan peran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan melaksanakan program penyaluran bantuan paket pangan bagi warga di Kabupaten Ponorogo yang melakukan isolasi mandiri terkait *Covid-19*. Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjamin gizi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri terkait pandemi *Covid-19* (Kominfo, 2020). Alasan dipilihnya tema mengenai bantuan paket pangan tambahan untuk isolasi mandiri *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo dalam penulisan laporan PKL ini dikarenakan program tersebut merupakan salah satu program baru yang dilaksanakan melalui Dinsos P3A serta ingin meninjau pelaksanaan program tersebut di lapangan.

METODE PELAKSANAAN

Adapun Tujuan Kegiatan PKL ini, antara lain:

1. Mengetahui pelaksanaan praktik kerja lapangan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.
2. Meninjau pelaksanaan jalannya kerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.
3. Meninjau pelaksanaan Program Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri *Covid-19* yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

Adapun ruang Lingkup dalam penulisan laporan PKL ini ialah mengenai pelaksanaan program bantuan paket pangan isolasi mandiri *Covid-19* pada tahun 2020 yang dilaksanakan melalui Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo. Selain itu dalam pembahasan tugas dan fungsi hanya terbatas pada beberapa sub bagian di Sekretariat Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo sesuai yang yang ditugaskan kepada penulis. Bagian tersebut antara lain bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian penyusunan program dan pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, merupakan unsur pelaksana di bidang sosial, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantu yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh Bapak SUPRIADI S.Sos., M.Si. (Periode tahun 2019-sekarang).

Tugas dan Fungsi Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo mempunyai Tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (KOMINFO, n.d.)

Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri Covid-19 Melalui Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan penyaluran bantuan COVID-19 Tahun 2020-2021 melalui Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- e. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PELAKSANAAN BANTUAN

Program Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri *Covid-19* merupakan salah satu upaya bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjamin gizi pada makanan warganya yang sedang melakukan isolasi mandiri terkait *Covid-19*. Hal tersebut dikarenakan warga yang menjalankan isolasi mandiri mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan. Warga yang dimaksud ialah warga yang melakukan isolasi mandiri karena terinfeksi *Covid-19* maupun yang mengalami kontak erat dengan penderita *Covid-19* serta lingkungan warga terinfeksi. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan untuk mendukung pemenuhan gizi seperti beras, telur, gula, minyak goreng, ikan kaleng, mie instan, buah, susu, vitamin C, dan minuman mengandung vitamin C. Bantuan tersebut diestimasikan dapat digunakan selama 14 hari. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan daya tahan tubuh warga yang menjalani isolasi mandiri dapat meningkat (Supriadi, 2020).

Berikut realisasi anggaran yang telah dilakukan Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo terkait Program Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020:

Tabel 1 Realisasi Anggaran Program Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri *Covid-19*

No	Waktu	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	s.d. 30 Juni 2020	32.340.000	31.872.500	467.500
2.	s.d. 31 Juli 2020	45.220.000	44.584.500	635.500
3.	s.d. 31 Agustus 2020	347.880.000	44.584.500	303.295.500
4.	s.d. 30 September 2020	360.550.000	359.514.500	1.035.500
5.	s.d. 31 Oktober 2020	3.569.710.000	1.952.839.000	1.616.871.000
6.	s.d. 30 November 2020	3.569.710.000	3.537.274.500	32.435.500
7.	s.d. 30 Desember 2020	3.658.785.000	3.630.288.500	28.496.500

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MASALAH

a. Mekanisme Penyaluran Bantuan Kurang Efektif

Berdasarkan mekanisme penyaluran bantuan pangan isolasi mandiri Covid-19 yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan bantuan masyarakat isolasi mandiri Covid-19 harus melewati birokrasi yang panjang. Selama ini, Dinsos P3A Ponorogo harus memperoleh laporan pengajuan bantuan yang berasal dari masyarakat desa dimana penerima bantuan tersebut adalah masyarakat yang terinfeksi *Covid-19* maupun yang mengalami kontak erat dengan penderita *Covid-19* serta lingkungan warga terinfeksi. Sementara bantuan itu diharapkan masyarakat agar diterima dengan cepat. Akan tetapi, pada kenyataannya bantuan tersebut harus melewati pengajuan kepada pemerintah yang membutuhkan proses yang panjang. Birokrasi yang panjang menyebabkan bantuan menjadi sedikit terlambat disalurkan. Sebagaimana diketahui bahwa isolasi mandiri tidak memperkenankan seseorang untuk keluar dari rumahnya. Apabila bantuan tidak segera disalurkan, maka masyarakat yang membutuhkan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari disebabkan dibatasinya akses menuju dunia luar, baik untuk bekerja maupun mencari makan. Selain itu, mekanisme yang panjang dapat menimbulkan stigma negatif di mata masyarakat berupa peran Dinsos P3A yang kurang efektif.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan tidak semua bantuan dapat diserahkan secara langsung oleh Dinsos P3A kepada masyarakat. Melihat banyaknya pengajuan dari pemerintah desa mengenai bantuan pangan isolasi mandiri serta wilayah Kabupaten Ponorogo yang relatif luas, maka kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai penyalur bantuan pangan tersebut juga membutuhkan jumlah yang banyak. Namun, terbatasnya sumber daya manusia maupun alat pengangkut menyebabkan bantuan tidak dapat disalurkan secara serentak antar desa melainkan secara bergantian dari satu desa ke desa lainnya. Selain itu, setelah bantuan sampai di desa yang dituju Dinsos P3A membutuhkan bantuan dari masyarakat atau relawan untuk menyalurkan bantuan tersebut agar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah yang telah diuraikan di atas, alternatif yang mungkin dapat mengurangi masalah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas sosial P3A Kabupaten Ponorogo dapat menggunakan sebuah aplikasi untuk mengetahui jumlah masyarakat isolasi mandiri Covid-19.

Dalam proses pemberian bantuan, Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo tidak perlu lagi menunggu permohonan pengajuan bantuan oleh Pemerintah Desa. Masyarakat yang terdampak Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan dapat lapor dengan menggunakan aplikasi atau mengisi sebuah form digital yang disediakan oleh dinas yang bersangkutan. Proses pengisian data tersebut dapat dilakukan saat baru melakukan dan setelah isolasi mandiri yang bersangkutan selesai. Tujuannya adalah dalam rangka monitoring jumlah pasien isolasi mandiri dan selanjutnya dapat dilakukan tindakan yang dibutuhkan (Komunikasi et al., 2020), diantaranya pemberian bantuan pangan kepada pasien. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan aplikasi antara lain mekanisme penyaluran bantuan menjadi lebih cepat, informasi yang diterima lebih akurat, dan lebih mudah diakses semua pihak.

b. Menambah sumber daya manusia dengan mengikutsertakan peran perguruan tinggi

Perguruan tinggi dapat berperan dalam membantu mengisi kekurangan akan kebutuhan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengerahkan mahasiswa untuk menjadi relawan, membantu Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo dalam menyalurkan bantuan pangan isolasi mandiri tersebut. Dengan bertambahnya sumber daya manusia, maka penyaluran bantuan akan lebih cepat dilakukan. Semakin cepat dilakukan, maka kebutuhan bagi warga akan semakin cepat terpenuhi. Penyaluran dapat dilaksanakan secara serentak antar desa, tidak perlu secara bergantian dari satu desa ke desa lainnya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat menambah pengalaman bagi mahasiswa serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia.

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, dan dapat disusun Laporan Praktik Kerja Lapangan yang mencakup penjabaran tugas, fungsi, dan pengalaman bekerja bagian Sekretariat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, serta secara khusus mengenai pelaksanaan Program Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri Covid-19 yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo. Program bantuan paket pangan untuk warga yang menjalankan isolasi mandiri merupakan program baru yang dilaksanakan melalui Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19. Kurang efektifnya mekanisme penyaluran bantuan disebabkan oleh proses pengajuan bantuan yang masih harus melewati birokrasi yang panjang.

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Program Bantuan Paket Pangan Isolasi Mandiri Covid-19 adalah:

- a. Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo dapat menggunakan sebuah aplikasi atau form digital untuk membantu mendata masyarakat yang memerlukan bantuan pangan untuk menjalankan isolasi mandiri. Sehingga, data dapat diakses secara *real time* tanpa menunggu pengajuan dari Pemerintah Desa.
- b. Dinsos P3A dapat meminta bantuan kepada perguruan tinggi setempat untuk mengerahkan sebagian mahasiswa untuk membantu penyaluran bantuan tersebut, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, permasalahan akan kurangnya sumber daya manusia dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. 2019. *Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019*. Ponorogo: Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Kominfo. 2020. "Pekan ini, Dinsos Ponorogo Memberikan Bantuan 700 Paket Pangan Tambahan Bagi Warga Isolasi Covid-19. 18 September 2020. <https://ponorogo.go.id/2020/09/18/pekan-ini-dinsos-ponorogo-berikan-bantuan-700-paket-pangan-tambahan-bagi-warga-isolasi-covid-19/>. (diakses 26 Maret 2021)
- KOMINFO, G. (n.d.). Tugas dan Fungsi – Dinas Sosial, P3A. Retrieved March 16, 2021, from <https://dinsos.ponorogo.go.id/tugas-dan-fungsi/Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN>
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak